

---

## Film Dirty Vote Sebagai Pendidikan Politik Pada Pemilu 2024 Di Kota Kendari

**Muhammad Ilham Ode Askar<sup>1\*</sup>, La Bilu<sup>2</sup>, Muhammad Aswan Zanynu<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Halu Oleo

milhamodeaskar.c1e121138ac@gmail.com

\*Email Korespondensi: milhamodeaskar.c1e121138ac@gmail.com

---

### **Abstract :**

**Abstract:** *This study aims to analyze the political messages conveyed in the documentary film Dirty Vote and explore how the people of Kendari City interpret these messages in the context of political education during the 2024 General Election. Employing a qualitative approach and Stuart Hall's reception theory, data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The findings indicate that audiences fall into three reception categories: dominant, negotiated, and oppositional positions. Most viewers adopt the dominant position, fully agreeing with the film's messages on alleged democratic irregularities, while others hold negotiated or oppositional positions. The study concludes that documentary films can function as an effective medium for political education by raising public awareness of democratic issues*

**Keywords:** *Dirty Vote film, political education, reception, 2024 election, Stuart Hall.*

### **Abstrak :**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pesan politik dalam film dokumenter Dirty Vote serta memahami bagaimana masyarakat Kota Kendari memaknai film tersebut dalam konteks pendidikan politik menjelang Pemilu 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori resepsi Stuart Hall, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemirsa film berada dalam tiga kategori resepsi: dominan, negosiasi, dan oposisi. Mayoritas pemirsa berada pada posisi dominan, menerima sepenuhnya pesan film tentang penyimpangan proses demokrasi, sedangkan sebagian berada pada posisi negosiasi dan satu informan berada pada posisi oposisi. Temuan ini menunjukkan bahwa film dokumenter dapat berperan sebagai media pendidikan politik yang efektif dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu demokrasi.

**Kata Kunci:** Film Dirty Vote, pendidikan politik, resepsi, Pemilu 2024, Stuart Hall

### **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi, di mana rakyat diberikan hak untuk memilih wakilnya secara langsung guna menjalankan fungsi pemerintahan. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan dibangun berdasarkan kehendak mayoritas rakyat. Oleh karena itu, integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat. Namun, dalam praktiknya, pemilu tidak selalu berjalan sesuai prinsip demokrasi ideal. Berbagai bentuk penyimpangan seperti politik uang, mobilisasi birokrasi, penyalahgunaan fasilitas negara, dan ketidaknetralan pejabat publik masih menjadi persoalan serius yang kerap terjadi di Indonesia (Djiwandono, 1983; Effendy, 2006).

Dalam konteks tersebut, peran media massa dan media alternatif menjadi sangat penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Media memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik, mengedukasi pemilih, serta meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Salah satu bentuk media

alternatif yang muncul dan mendapatkan perhatian luas adalah film dokumenter. Film jenis ini tidak hanya berfungsi sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi politik yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan kritik terhadap praktik kekuasaan. Di era digital, film dokumenter menjadi alat yang kuat dalam menyuarakan narasi tandingan terhadap dominasi media arus utama, dan menjadi sarana penting dalam memperluas literasi politik warga negara (Darwati, 2011; Ramadhan & Herman, 2021).

Salah satu film dokumenter yang memantik perdebatan publik menjelang Pemilu 2024 adalah *Dirty Vote*, yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan dirilis pada 11 Februari 2024 melalui platform YouTube, tepat pada masa tenang kampanye. Film ini menyoroti dugaan berbagai pelanggaran dan manipulasi yang terjadi selama tahapan pemilu, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, netralitas lembaga penyelenggara, pengangkatan pejabat kepala daerah secara politis, hingga keterlibatan langsung pejabat tinggi negara dalam proses kampanye. Film ini melibatkan tiga pakar hukum tata negara sebagai narasumber utama, yaitu Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar, yang memberikan pandangan kritis terhadap proses demokrasi Indonesia.

Pro dan kontra mengiringi film yang telah ditonton lebih dari 9 juta kali tersebut. Tanggapan dan respon yang berbeda banyak kita temukan di berbagai artikel yang membahas mengenai film ini.

Secara keseluruhan Isi Film ini lebih menyudutkan Kubu pasangan 02 (Prabowo-Gibran) yang berambisi Pemilu satu putaran. Secara logis dengan banyaknya pemaparan data pada film ini tentu melemahkan paslon Prabowo-Gibran. Tapi pada hasil rekapitulasi pasangan Prabowo-Gibran menang di 11 Kecamatan dengan Perolehan 130.738 suara. Pasangan Anies Muhaimin mendapat 58.226 suara. Sementara pasangan Ganjar-Mahfud hanya mendapat 11.553 Suara di Kendari (KPU.go.id 2024).

Respon terhadap film ini sangat beragam. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bentuk pendidikan politik yang membangkitkan kesadaran publik terhadap kerusakan sistem demokrasi, sementara yang lain mengkritiknya sebagai bentuk kampanye terselubung yang tidak netral. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan resepsi atau pemaknaan di kalangan masyarakat, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, politik, dan tingkat literasi masing-masing individu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana film *Dirty Vote* dipahami oleh masyarakat, terutama dalam konteks lokal seperti di Kota Kendari yang juga memiliki dinamika politik tersendiri.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana pesan-pesan politik dalam film *Dirty Vote* diterima dan dimaknai oleh masyarakat Kota Kendari dalam konteks pendidikan politik menjelang Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori resepsi Stuart Hall sebagai landasan analisis. Hall (1973/2024) menjelaskan bahwa audiens tidak pasif dalam menerima pesan media, melainkan aktif membentuk makna berdasarkan posisi mereka, yang terbagi dalam tiga kategori: posisi dominan, posisi negosiasi, dan posisi oposisi. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana masyarakat menginterpretasi film *Dirty Vote* serta bagaimana film tersebut berperan dalam membentuk kesadaran politik publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami bagaimana masyarakat Kota Kendari memaknai film *Dirty Vote* sebagai media pendidikan politik menjelang Pemilu 2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman subjektif dan interpretasi sosial dari informan (Zhang & Creswell, 2020). Informan dipilih secara purposive, terdiri dari sembilan orang yang telah menonton film dan memiliki perhatian terhadap isu politik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,

observasi terhadap film, dan dokumentasi dari media serta sumber daring. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk fleksibilitas dalam penggalan data (Given, 2020). Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang mencakup reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk memahami respons informan, digunakan teori resepsi dari Stuart Hall (2021), yang membagi pemaknaan ke dalam posisi dominan, negosiasi, dan oposisi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis film *Dirty Vote* sebagai media pendidikan politik dan bagaimana masyarakat Kota Kendari memaknai pesan-pesan yang disampaikan dalam film tersebut. Analisis dilakukan menggunakan teori resepsi dari Stuart Hall, yang membagi posisi pemaknaan menjadi tiga kategori: dominan, negosiasi, dan oposisi.

### **Deskripsi Film Dirty Vote**

Film dokumenter *Dirty Vote* adalah film berdurasi 1 jam 57 menit 22 detik yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan pertama kali tayang pada 11 Februari 2024 pukul 11.11 WIB, bertepatan dengan masa tenang Pemilu melalui kanal Youtube WatchDoc Documentary dan YouTube "Dirty Vote". Dokumenter ini menghadirkan tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dan Feri Amsari dari Universitas Andalas yang membedah dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024. Mereka mengulas berbagai praktik yang dinilai melanggar prinsip demokrasi dan mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon presiden.

Peluncuran *Dirty Vote* bertepatan dengan masa tenang pemilu dan langsung menyita perhatian publik. Dalam dua hari, tayangan ini telah disaksikan lebih dari 13 juta kali, dan meningkat menjadi sekitar 20 juta penayangan dalam kurun waktu seminggu. Film ini tersebar tidak hanya di kanal resminya, namun juga diunggah ulang oleh akun-akun lain seperti PSHK Indonesia dan kanal milik mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Respons terhadap dokumenter ini sangat beragam. Sebagian besar masyarakat mengapresiasi keberaniannya dalam menyuarakan kritik terhadap proses demokrasi, namun ada juga yang menuduhnya sebagai kampanye terselubung yang mendiskreditkan pasangan calon tertentu serta Presiden Joko Widodo.

Dalam proses produksinya, *Dirty Vote* dikerjakan bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Joni Aswira, Ketua Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. Pendanaan film ini berasal dari para individu dan kelompok yang memiliki perhatian terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Sutradara Dandhy menekankan bahwa film ini bukan dibuat untuk momen politik semata, melainkan sebagai bagian dari edukasi masyarakat terhadap praktik demokrasi yang sehat.

Sejak dirilis, film ini sempat menemui kendala distribusi. Beberapa pengguna internet melaporkan bahwa film sulit ditemukan melalui pencarian di YouTube, meskipun tetap bisa diakses melalui tautan langsung. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembatasan atau sensor tidak langsung terhadap konten film tersebut.

*Dirty Vote* menggunakan pendekatan visual yang tajam dan argumentatif dalam menyoroti isu-isu utama seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, mobilisasi birokrasi, dan tekanan terhadap pemilih. Narasinya dibangun untuk mengajak penonton memahami bagaimana demokrasi bisa dimanipulasi secara sistematis, serta pentingnya kesadaran publik terhadap hal tersebut. Dalam konteks ini, film ini menjadi semacam peringatan akan rusaknya proses elektoral jika tidak diawasi dengan kritis oleh masyarakat.

Sutradara Dandhy Dwi Laksono sendiri merupakan figur yang dikenal dalam dunia jurnalisme dan dokumenter Indonesia. Sebelumnya, ia telah menggarap sejumlah film

dokumenter investigatif seperti *Sexy Killers* (2019), yang menyingkap keterkaitan antara elit politik dan industri batu bara. Ia juga merupakan pendiri WatchDoc, sebuah rumah produksi independen yang banyak melahirkan dokumenter dengan tema sosial-politik yang kritis.

### **Pesan dan Konten Pada Film *Dirty Vote***

Pemekaran wilayah Papua menjadi enam provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Namun, melalui undang-undang pemekaran yang disahkan pada tahun 2022, wilayah ini kini terbagi menjadi enam provinsi dengan tambahan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya dan partisipasi provinsi-provinsi baru tersebut dalam Pemilu 2024 menimbulkan diskusi mengenai sebaran wilayah dan dampaknya terhadap dinamika politik nasional. Film "*Dirty Vote*" menyoroti isu ini dengan membandingkannya dengan pengalaman Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Film *Dirty Vote* menyoroti pemekaran Papua menjadi enam provinsi sebagai salah satu isu yang diduga memiliki dimensi politik dalam Pemilu 2024. Film ini juga membandingkan pemekaran Papua dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada 2012, yang baru bisa mengikuti pemilu enam tahun setelah berdiri. Sebaliknya, provinsi-provinsi baru di Papua langsung berpartisipasi dalam Pemilu 2024, meskipun baru dibentuk pada 2022. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan motif di balik percepatan ini.

Dalam sistem pemilihan presiden Indonesia, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara nasional, tetapi juga oleh sebaran suara di lebih dari setengah jumlah provinsi. Dengan bertambahnya jumlah provinsi dari 34 menjadi 38, syarat sebaran suara juga meningkat dari minimal 18 menjadi 20 provinsi. Dalam konteks ini, pemekaran Papua dapat membantu kandidat tertentu memenuhi syarat tersebut, terutama jika wilayah ini cenderung memberikan suara dominan kepada pihak tertentu. Film ini juga menyoroti peran Tito Karnavian, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua saat Jokowi memenangkan Pilpres 2014 dan 2019 di Papua, dan kini sebagai Menteri Dalam Negeri yang mengesahkan pemekaran Papua. Ini menimbulkan dugaan bahwa pemekaran Papua mungkin memiliki dimensi politik yang menguntungkan pihak tertentu dalam pemilu.

Film *Dirty Vote* menyoroti proses pengangkatan pejabat (Pj) gubernur dan walikota sebagai salah satu isu yang memiliki dampak besar terhadap dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Dalam film ini, pengangkatan Pj kepala daerah dianggap memiliki dimensi politik yang perlu dicermati, terutama karena mekanisme pengangkatannya memberikan kewenangan besar kepada pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu dalam pemilu yang akan datang. Dalam mekanisme pengangkatannya, 20 Pj gubernur diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan oleh Presiden, sementara 182 Pj walikota dan bupati diusulkan oleh gubernur dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Berbeda dengan kepala daerah definitif yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat, Pj kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memiliki peran sentral dalam proses pengangkatan Pj kepala daerah, termasuk di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran Papua. Film ini mengaitkan kebijakan pemekaran Papua dengan strategi politik tertentu, di mana pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk menunjuk Pj gubernur di wilayah baru tersebut. Selain itu, banyak dari Pj kepala daerah yang diangkat berasal dari pejabat kementerian atau aparat keamanan yang sebelumnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan daerah yang mereka pimpin.

Salah satu isu penting dalam film *Dirty Vote* adalah dugaan ketidaknetralan kepala desa dalam Pemilu 2024, yang terlihat dari deklarasi dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran oleh ribuan kepala desa dalam organisasi "Desa Bersatu". Meskipun diklaim sebagai acara "silaturahmi nasional", atribut dan narasi yang ditampilkan menunjukkan keberpihakan politik,

yang berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu dan prinsip netralitas aparat desa. Kepala desa memiliki peran strategis karena menguasai data pemilih, dana desa, dan distribusi bantuan sosial, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Selain sebagai pelaku, mereka juga kerap menjadi objek tekanan politik dari berbagai pihak, termasuk elite daerah dan nasional, untuk mendukung calon tertentu dengan iming-iming revisi UU Desa atau imbalan politik lainnya. Praktik konversi dukungan menjadi perlindungan hukum bagi kepala desa yang bermasalah serta politisasi bansos yang dikaitkan dengan nama Presiden Jokowi menunjukkan betapa dalamnya intervensi politik dalam struktur pemerintahan desa, yang secara keseluruhan mencederai integritas demokrasi.

Film *Dirty Vote* mengungkap ketidaknetralan pejabat negara dalam Pemilu 2024 melalui dua aspek utama: penyalahgunaan fasilitas negara dan keterlibatan aktif pejabat publik dalam kampanye. Salah satu sorotan penting adalah penggunaan helikopter milik TNI oleh Prabowo Subianto dalam kampanyenya, yang melanggar prinsip netralitas dan menciptakan ketimpangan kompetisi antarkandidat. Selain itu, sejumlah pejabat negara juga terlibat langsung dalam tim kampanye sambil tetap memanfaatkan fasilitas negara dan kewenangan jabatan.

Selain itu, *Dirty Vote* menyoroti berbagai kejanggalan prosedural dalam penanganan perkara tersebut, seperti permohonan yang dicabut dan didaftarkan kembali di hari libur, serta ketidakmampuan Majelis Kehormatan MK (MKMK) untuk membatalkan putusan meski telah menyatakan adanya pelanggaran etik berat oleh Ketua MK. Perbedaan pendapat yang tajam antar hakim konstitusi dalam putusan ini juga memperkuat anggapan bahwa keputusan MK tidak semata didasarkan pada prinsip hukum dan konstitusi, melainkan terpengaruh oleh kepentingan politik. Semua hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai integritas MK sebagai lembaga yang seharusnya netral, dan dampaknya terhadap keadilan serta legitimasi Pemilu 2024.

### **Encoding Film *Dirty Vote***

Encoding merupakan proses produksi makna di sisi pembuat film, di mana elemen-elemen film dirancang untuk menyampaikan pesan tertentu kepada penonton (Johan Fornas 2024). Dalam encoding terbagi menjadi tiga tahap yaitu Kerangka pengetahuan (Framework of knowledge), Hubungan produksi (Relation of production), dan Kerangka teknis (Technical infrastructure). Pada Tahap ini peneliti mengambil hasil penelitian menggunakan observasi dan studi dokumentasi untuk menelusuri mengenai tiga tahap Encoding dalam penyusunan film “*Dirty Vote*”.

#### **a) Kerangka pengetahuan (Framework of knowledge)**

Instrumentalisme Pada tahap produksi *Dirty Vote*, pesan dalam film dirancang dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman, serta konteks sosial para pembuatnya untuk menyuarakan kegelisahan terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia. Sutradara Dandhy Dwi Laksono menjelaskan bahwa film ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap berbagai penyimpangan politik yang semakin dianggap normal, seperti pejabat tinggi yang terang-terangan berkampanye tanpa sanksi dan bantuan sosial yang diklaim sebagai pemberian pribadi presiden. Ia menyoroti bahwa degradasi demokrasi ini terjadi secara bertahap dan membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan praktik yang tidak adil.

Gagasan film ini juga diperkuat oleh kontribusi dari akademisi seperti Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari yang turut tampil dalam film sebagai narasumber utama. Zainal menyebut bahwa ide awal film muncul setelah Dandhy menghubunginya pada 29 Januari 2024, terinspirasi dari riset Feri Amsari mengenai peta kecurangan pemilu. Dalam film, Feri membahas bagaimana struktur pemilu sudah timpang sejak awal karena hanya partai besar yang bisa mengajukan calon presiden, dan ketimpangan ini diperparah dengan upaya

rekayasa hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Bivitri, sebagai ahli hukum tata negara, menjelaskan bagaimana bantuan sosial dijadikan alat politik oleh penguasa untuk memengaruhi pemilih, yang menurutnya merupakan bentuk politik uang terselubung. Proses produksi film dilakukan melalui riset mendalam berbasis kliping berita dan data faktual, sementara narasi dan bahasa disusun dengan cermat agar dapat dipahami publik luas. Para produser dan narasumber secara sadar ingin menyampaikan perspektif “helikopter view” agar masyarakat dapat melihat gambaran besar tentang kerusakan sistem demokrasi dan meningkatnya dominasi oligarki secara terang-terangan. Film ini tidak hanya menjadi dokumentasi kritik politik, tetapi juga ajakan moral agar publik kembali mempertanyakan sistem kekuasaan dan mengambil peran aktif dalam menjaga demokrasi.

#### **b) Hubungan produksi (Relation of production)**

Dalam proses produksi *Dirty Vote*, struktur organisasi pesan dibentuk melalui kolaborasi erat antara berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan integritas pemilu. Sutradara Dandhy Dwi Laksono memulai proyek ini setelah terinspirasi dari podcast Feri Amsari tentang peta kecurangan pemilu. Ia kemudian menghubungi Feri dan tim risetnya dari Times Indonesia untuk mendalami data yang telah dikumpulkan. Proses ini tidak berhenti pada inspirasi semata, melainkan dilanjutkan dengan verifikasi dan riset lebih lanjut. Untuk memperkaya perspektif, Dandhy melibatkan Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar sebagai narasumber utama, yang secara sukarela bergabung tanpa mempertanyakan soal dana atau teknis produksi karena mereka memiliki keresahan yang sama terhadap situasi politik saat ini. Struktur produksi ini menunjukkan bahwa *Dirty Vote* dibangun atas dasar kolaborasi independen dengan orientasi pada kepentingan publik, bukan sebagai alat politik partisan, melainkan sebagai sarana edukasi dan perlawanan terhadap penyimpangan demokrasi.

#### **c) Kerangka teknis (Technical infrastructure)**

Pada tahap akhir produksi *Dirty Vote*, teknologi dan media digital digunakan secara strategis untuk menyampaikan pesan secara luas dan efektif. Film ini dikemas dalam format dokumenter yang memadukan wawancara tokoh, cuplikan berita, serta visualisasi data melalui infografis. Pendekatan ini dipilih agar informasi yang kompleks mengenai politik, hukum, dan pemilu dapat disampaikan dengan lebih ringan dan mudah dicerna. Dari aspek teknis, setiap elemen visual seperti warna, tata letak, hingga gaya penyampaian disesuaikan untuk menciptakan pengalaman menonton yang komunikatif bagi masyarakat umum. Fokus utama film bukan hanya menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan edukasi yang inklusif. Oleh karena itu, visual yang informatif dan narasi yang terstruktur menjadi bagian penting untuk menjembatani kerumitan isu dengan pemahaman publik.

### **Decoding Terhadap Film *Dirty Vote***

Decoding merupakan proses interpretasi di sisi penonton, di mana mereka memaknai pesan film sesuai dengan pengalaman, latar belakang, dan perspektif sosial mereka. Menurut Stuart Hall, terdapat tiga jenis pemaknaan dalam hubungan antara penulis dan pembaca, serta cara audiens menafsirkan pesan (Bødker, 2018; Hall, 2014, 2019). Dalam menganalisis cara penonton memaknai film. Menurut Hall, sebagaimana dikutip oleh Morrison (2010: 171), penonton memaknai pesan film melalui tiga posisi hipotetis, maka dari peneliti melakukan wawancara dengan para pemirsa Film untuk mengetahui pola dari tiga posisi tersebut yaitu:

#### **a) Posisi dominan (Dominant Position)**

Pada posisi ini, pemirsa menerima sepenuhnya pesan yang disampaikan oleh film tanpa banyak mempertanyakan. Informan seperti Abdul Hamid, Rahmat Asdaruddin, Jordi Apriyanto, dan Muhammad Haris Tahir berada dalam posisi ini. Mereka mengakui bahwa film *Dirty Vote* menyadarkan mereka akan praktik-praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu, seperti politisasi kebijakan, penunjukan

penjabat kepala daerah secara strategis, dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Mereka juga menganggap film ini sebagai bentuk pendidikan politik yang membuka wawasan tentang manipulasi politik yang mungkin tidak terjangkau oleh informasi media arus utama. Pemahaman mereka sejalan dengan pesan yang dikonstruksi dalam film, sehingga terjadi penerimaan utuh terhadap narasi yang disampaikan (Hall, 2021).

#### ✓ **Isu Pemilu Satu Putaran dalam Pemilu 2024**

Wacana mengenai pelaksanaan Pemilu satu putaran pada Pemilu 2024 menjadi salah satu isu yang cukup menonjol dalam diskursus politik pasca-pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari berbagai latar belakang organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil, tampak bahwa mayoritas informan memandang realisasi pemilu satu putaran bukan sekadar hasil perolehan suara secara elektoral, melainkan bagian dari strategi politik yang disusun secara sistematis oleh pasangan calon tertentu, khususnya paslon 02 (Prabowo-Gibran), dengan dukungan dari pemerintah.

Beberapa informan, seperti Abdul Hamid, Rahmat Asdaruddin, dan Jordi Apriyanto, menyatakan bahwa agenda pemilu satu putaran merupakan strategi politik yang diusung oleh paslon 02 dan mendapat dukungan langsung dari pemerintah. Abdul Hamid menyebut bahwa pemerintah berperan aktif melalui pengerahan buzzer di media sosial serta pengaruh terhadap penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan. Hal ini memperlihatkan indikasi keterlibatan kekuasaan dalam membentuk opini publik dan mengamankan jalannya proses pemilu untuk memastikan kemenangan satu putaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dari berbagai latar belakang, dapat disimpulkan bahwa wacana pemilu satu putaran dalam Pemilu 2024 dipandang bukan sebagai hasil yang murni dari proses elektoral yang demokratis, melainkan sebagai bagian dari strategi politik terencana yang didukung oleh kekuatan negara. Mayoritas informan meyakini bahwa pasangan calon nomor urut 02 memperoleh keuntungan dari skenario ini melalui dukungan pemerintah, keterlibatan instrumen kekuasaan, serta pengaruh terhadap penyelenggara pemilu dan opini publik.

Film *Dirty Vote* berperan signifikan dalam membentuk kesadaran kritis para informan, di mana mereka menilai bahwa keberhasilan satu putaran tidak lepas dari praktik “cawe-cawe” politik yang mengarah pada bentuk manipulasi sistematis. Temuan ini mencerminkan adanya krisis kepercayaan terhadap netralitas pemilu serta kekhawatiran akan tergerusnya prinsip-prinsip demokrasi dalam kontestasi politik nasional.

#### ✓ **Pemekaran wilayah Papua dalam kaitannya dengan agenda Pemilu satu putaran 2024**

Wacana pemekaran wilayah Papua menjelang Pemilu 2024 menjadi salah satu isu strategis yang dipandang memiliki keterkaitan erat dengan agenda politik nasional, khususnya dalam konteks pemenangan Pemilu satu putaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan elemen masyarakat sipil, ditemukan adanya kecenderungan penilaian kritis terhadap motif di balik kebijakan pemekaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil, dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah Papua menjelang Pemilu 2024 dipandang sebagai kebijakan yang sarat dengan kepentingan politik elektoral. Mayoritas informan menilai bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tidak murni didasarkan pada aspirasi rakyat atau kebutuhan pembangunan, melainkan lebih sebagai strategi

sistematis untuk memperluas basis suara pasangan calon tertentu, khususnya paslon 02 (Prabowo-Gibran).

Secara umum, informan menunjukkan sikap kritis terhadap narasi pembangunan yang dibawa oleh pemerintah, karena pemekaran Papua dianggap sebagai alat politik yang digunakan dalam momen strategis menjelang pemilu. Dengan demikian, pemekaran wilayah Papua dalam konteks Pemilu 2024 dipandang sebagai bentuk politisasi kebijakan yang berpotensi melemahkan prinsip netralitas dan keadilan dalam proses demokrasi.

✓ **Pengangkatan PJ Gubernur dan Walikota/Bupati dalam dinamika politik Pemilu 2024**

Film *Dirty Vote* menjadi salah satu referensi penting yang memperkuat persepsi para informan bahwa pengangkatan PJ merupakan bagian dari praktik politik yang sistematis dan terstruktur. Langkah ini dinilai mencederai asas netralitas, transparansi, dan keadilan dalam pemilu, serta berpotensi merusak tatanan demokrasi.

Dengan demikian, pengangkatan PJ kepala daerah tidak dilihat sebagai upaya administratif semata, melainkan sebagai strategi politik yang membahayakan integritas Pemilu 2024 dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia.

✓ **Ketidaknetralan PJ Gubernur**

Hasil wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan bahwa ketidaknetralan para Penjabat (PJ) Gubernur dan Walikota/Bupati yang ditunjuk oleh pemerintah pusat menjelang Pemilu 2024 menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Informan dari berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran bahwa praktik ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika birokrasi, melainkan merupakan bagian dari strategi politik yang sistematis untuk memenangkan pasangan calon tertentu, khususnya paslon 02.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan dari berbagai latar belakang organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan meyakini adanya ketidaknetralan yang sistematis dan terstruktur dalam penunjukan serta tindakan para Penjabat (PJ) Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu 2024.

✓ **Ketidaknetralan Kepala Desa**

Dari serangkaian wawancara yang dilakukan terhadap beberapa Masyarakat dan perwakilan organisasi kemahasiswaan di Kendari, terungkap adanya kekhawatiran besar terhadap praktik ketidaknetralan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam Pemilu 2024. Seluruh informan mengindikasikan bahwa Kepala Desa telah dimobilisasi secara sistematis untuk memenangkan salah satu pasangan calon, khususnya paslon 02.

Para informan menilai bahwa tindakan ini bukan hanya mencederai prinsip netralitas pejabat publik, tetapi juga mengancam integritas demokrasi, mengingat Kepala Desa memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat desa. Ketika Kepala Desa berpihak, potensi intimidasi, tekanan sosial, hingga manipulasi pilihan politik masyarakat menjadi sangat mungkin terjadi. Praktik ini dinilai sebagai bagian dari upaya sistematis dan terstruktur untuk mengamankan suara, sebagaimana dijelaskan dalam film *Dirty Vote*, serta menandakan adanya arahan dan koordinasi politik dari pusat.

---

✓ **Ketidaknetralan Pejabat Negara**

Presiden, menteri, kepala daerah, dan pejabat struktural lainnya dianggap telah menggunakan jabatan dan fasilitas negara untuk mendukung pasangan calon tertentu, terutama paslon 02. Tindakan ini dinilai mencederai prinsip dasar demokrasi, merusak keadilan dalam kontestasi politik, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Ketidaknetralan tersebut juga dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sistemik dan terstruktur.

Dengan demikian, para informan menegaskan pentingnya netralitas pejabat negara dalam pemilu sebagai wujud integritas demokrasi dan penghormatan terhadap konstitusi. Ketika pejabat negara tidak lagi menjadi pengawal demokrasi, tetapi justru menjadi alat kekuasaan, maka demokrasi berada dalam ancaman serius.

✓ **Kabinet Kampanye Tanpa Cuti**

Isu pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh anggota kabinet Presiden Joko Widodo selama masa kampanye Pemilu 2024 menjadi salah satu perhatian utama para informan dalam wawancara ini. Mayoritas dari mereka menyuarakan keprihatinan terhadap keterlibatan menteri dan pejabat negara lainnya dalam kegiatan kampanye tanpa mematuhi aturan yang berlaku, seperti kewajiban mengambil cuti dan larangan menggunakan fasilitas negara.

✓ **Ketidaknetralan (kampanye) Presiden Jokowi**

Isu mengenai keterlibatan Presiden Jokowi dalam proses kampanye pemilihan umum 2024 menjadi salah satu sorotan utama dalam film *Dirty Vote*, dan tema ini turut menjadi bahan diskusi dalam wawancara dengan para informan. Mayoritas informan menilai bahwa tindakan Presiden yang secara terbuka memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 02 mencederai prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang kepala negara.

Dengan demikian, para informan menganggap bahwa keterlibatan Presiden dan kabinetnya dalam proses kampanye bukan sekadar masalah moral dan etika, melainkan juga ancaman serius terhadap integritas demokrasi di Indonesia. Pemilu yang seharusnya menjadi arena kontestasi yang adil dan bebas, berubah menjadi sarana pelanggaran kekuasaan yang tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan politik bagi seluruh peserta pemilu.

✓ **Ketidaknetralan dan Inkompetensi Bawaslu**

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah informan, terungkap adanya pandangan kritis terhadap kinerja dan netralitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Mayoritas informan menilai bahwa Bawaslu tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan terkesan abai terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu berlangsung.

Secara umum, para informan sepakat bahwa Bawaslu gagal menunjukkan sikap netral dan tegas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Film *Dirty Vote* menjadi salah satu referensi penting yang memperlihatkan bukti-bukti kelemahan Bawaslu, baik dalam bentuk pembiaran terhadap pelanggaran maupun dugaan intervensi politik dalam tubuh lembaga tersebut. Kondisi ini memperlihatkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu, yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas demokrasi.

✓ **Ketidaknetralan KPU**

Dalam wawancara dengan enam narasumber, isu ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 menjadi perhatian utama. Secara umum, para informan sepakat bahwa KPU tidak menunjukkan sikap independen

dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai tindakan dan kebijakan KPU yang dinilai sarat keberpihakan serta tunduk pada tekanan politik dari kekuasaan.

ini menunjukkan bahwa ketidaknetralan KPU dalam Pemilu 2024 bukan hanya menjadi persepsi semata, melainkan telah dibentuk oleh berbagai indikasi faktual yang ditunjukkan dalam film *Dirty Vote* dan diperkuat oleh pengalaman serta penilaian para informan. Ketidaknetralan tersebut dinilai telah mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu serta mengancam legitimasi hasil pemilu itu sendiri.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memandang KPU tidak menjalankan perannya secara independen dan netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Ketidaknetralan tersebut ditunjukkan melalui berbagai tindakan dan kebijakan yang dinilai menguntungkan salah satu pasangan calon, khususnya paslon 02.

Secara umum, para informan menilai bahwa intervensi kekuasaan dalam tubuh KPU telah mencederai integritas dan kredibilitas lembaga tersebut sebagai penyelenggara pemilu. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan.

#### ✓ **Masalah Pada Mahkamah Konstitusi**

Para informan yang diwawancarai dalam penelitian ini secara umum menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah kehilangan independensinya dalam menyikapi dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Mayoritas informan sepakat bahwa keputusan MK, khususnya dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden, merupakan bentuk paling nyata dari kecurangan terstruktur yang dilegalkan secara hukum.

Konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, terutama keterlibatan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu kandidat, semakin memperkuat persepsi publik bahwa MK tidak lagi independen dan netral. Hal ini memunculkan krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan tertinggi di bidang konstitusi dan memperkuat asumsi bahwa jalannya Pemilu 2024 telah diarahkan untuk memenuhi ambisi kekuasaan kelompok tertentu. Dengan demikian, para informan secara tegas memandang bahwa peran MK dalam dinamika politik Pemilu 2024 bukan sebagai pelindung konstitusi, melainkan sebagai pemain aktif dalam proses delegitimasi demokrasi yang adil dan transparan.

#### **Posisi Negosiasi (Negotiated Position)**

Pada posisi ini, pemirsa menerima sebagian isi pesan film, tetapi tetap melakukan penafsiran ulang sesuai dengan pengalaman atau latar belakangnya. Informan seperti Irpan dan Adam mengakui adanya nilai edukatif dalam film tersebut, namun mereka mengkritisi waktu penayangan yang berdekatan dengan masa tenang pemilu, serta potensi film digunakan sebagai alat kampanye terselubung. Posisi negosiasi ini menunjukkan bahwa informan tidak sepenuhnya menolak atau menerima pesan, tetapi menyeimbangkan antara isi film dan konteks politik yang melingkupinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Hall bahwa audiens aktif dalam membentuk makna berdasarkan posisi sosial dan budaya masing-masing

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Haris Tahir dan Irpan, diperoleh kesimpulan bahwa kedua informan secara umum menerima dan mengafirmasi sebagian besar temuan dalam film *Dirty Vote*, terutama yang berkaitan dengan praktik-praktik penyimpangan dalam Pemilu 2024, seperti ketidaknetralan pejabat negara, penunjukan pejabat kepala daerah secara politis, serta keterlibatan Presiden Jokowi dalam mendukung paslon 02.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan pandangan di antara keduanya. Irpan, misalnya, tidak sepenuhnya setuju dengan narasi dalam *Dirty Vote* terkait isu pemekaran wilayah Papua yang disebut sebagai strategi pemenangan paslon 02. Menurutnya, pemekaran wilayah di Papua sudah lama dirancang sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan bukan semata agenda politik menjelang pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Irpan tetap bersikap kritis terhadap sebagian konten dalam film dan tidak menerima semua narasi secara mutlak.

### **Posisi Oposisi (Oppositional Position)**

Dalam posisi ini, pemirsa menolak secara menyeluruh isi dan pesan dari film. Hanya satu informan, yakni Bunyamin, yang menempati posisi ini. Ia menganggap film *Dirty Vote* tidak obyektif dan cenderung provokatif. Menurutnya, film tersebut sarat kepentingan politik tertentu dan bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penolakan ini menunjukkan bahwa makna media tidak bersifat mutlak dan terbuka terhadap interpretasi yang bertentangan, tergantung pada posisi ideologis pemirsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Fiqi Pranata, dapat disimpulkan bahwa informan cenderung memiliki pandangan yang moderat dan afirmatif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan dalam film *Dirty Vote*. Informan memandang bahwa berbagai tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut seperti dugaan rekayasa kemenangan satu putaran, ketidaknetralan pejabat negara, keterlibatan kepala desa, hingga keberpihakan penyelenggara pemilu belum memiliki dasar bukti yang kuat untuk dijadikan kesimpulan atau tuduhan yang sah.

Dalam menyikapi isu-isu tersebut, informan menunjukkan kepercayaan terhadap mekanisme formal dalam sistem demokrasi, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, verifikasi data, dan penghormatan terhadap prosedur hukum. Ia menilai bahwa kritik terhadap pemerintah maupun penyelenggara pemilu seyogianya disalurkan melalui jalur konstitusional, bukan melalui narasi film dokumenter yang bersifat satu arah. Jika dikaitkan dengan teori resepsi Stuart Hall, posisi informan dapat dikategorikan sebagai *oppositional position*, yakni posisi di mana penerima pesan (audiens) menolak makna dominan atau ideologi yang disampaikan dalam teks media. Dalam hal ini, informan secara sadar menolak kerangka naratif dan interpretasi politik yang ditawarkan oleh film *Dirty Vote*, dan justru memaknai isu-isu yang diangkat dengan cara yang bertentangan. Dengan demikian, informan tidak hanya bersikap kritis terhadap konten film, tetapi juga menunjukkan bentuk resistensi terhadap pesan politik yang disampaikan, berdasarkan kerangka pandangannya sendiri yang lebih percaya pada legitimasi formal dan prosedural dalam sistem demokrasi.

### **Analisis dan Kaitannya dengan Pendidikan Politik**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa film dokumenter seperti *Dirty Vote* dapat menjadi sarana pendidikan politik alternatif yang efektif, terutama dalam membangkitkan kesadaran kritis masyarakat terhadap proses demokrasi. Film ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini melalui visualisasi, narasi hukum, dan analisis politik yang sistematis. Respons beragam dari pemirsa menunjukkan bahwa pendidikan politik melalui media bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pengalaman, serta sikap politik masing-masing individu.

Temuan ini memperkuat gagasan bahwa media, khususnya film dokumenter, memiliki potensi besar dalam membentuk budaya politik partisipatif, meskipun tetap diperlukan literasi media agar masyarakat dapat menilai isi media secara kritis. Dalam konteks pemilu, film ini berperan sebagai pemantik diskusi publik yang sehat, sekaligus menjadi pengimbang informasi di tengah polarisasi politik yang tinggi.

---

**KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa film *Dirty Vote* berfungsi sebagai media pendidikan politik yang mampu membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap praktik-praktik yang berpotensi merusak integritas demokrasi, khususnya menjelang Pemilu 2024. Berdasarkan teori resepsi Stuart Hall, ditemukan bahwa informan berada pada tiga posisi pemaknaan: dominan, negosiasi, dan oposisi. Mayoritas informan menerima penuh pesan dalam film dan berada pada posisi dominan-hegemonik, sedangkan sebagian menafsirkan ulang isi film secara kritis (posisi negosiasi), dan satu informan menolak isi film secara menyeluruh (posisi oposisi). Variasi resepsi ini menunjukkan bahwa pemirsa aktif dalam membentuk makna pesan politik berdasarkan latar belakang sosial dan pengalaman pribadi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa media alternatif seperti film dokumenter memiliki potensi besar dalam memperkuat literasi politik masyarakat, asalkan dikemas secara faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemanfaatan media visual sebagai sarana pendidikan politik perlu mendapat perhatian lebih, baik oleh penyelenggara pemilu, pendidik, maupun pembuat kebijakan. Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan mengenai efektivitas media digital lainnya dalam membentuk kesadaran politik generasi muda di era demokrasi digital.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bødker, H. (2018). Journalism as critique: Professional and academic discourses. *Journalism Studies*, 19(14), 2125–2138. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2017.1319262>
- Creswell, J. W., & Zhang, W. (2020). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage Publications.
- Darwati, L. (2011). Film dokumenter sebagai media kritik sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 123–134.
- Djiwandono, J. S. (1983). *Pendidikan politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Effendy, O. U. (2006). *Ilmu, teori, dan filsafat komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Given, L. M. (2020). *The SAGE encyclopedia of qualitative research methods*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hall, S. (2014). *Representation: Cultural representations and signifying practices* (2nd ed.). Sage.
- Hall, S. (2019). Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.), *Culture, media, language* (pp. 128–138). Routledge.
- Hall, S. (2021). *Teori resepsi dan decoding media massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KPU.go.id. (2024). Hasil rekapitulasi suara Pemilu Presiden 2024 tingkat Kota Kendari. Diakses dari <https://www.kpu.go.id/>

Morrison, D. E. (2010). *The space of opinion: Media intellectuals and the public sphere*. Oxford University Press.

Ramadhan, A., & Herman, R. (2021). Film dokumenter sebagai media pembelajaran politik: Studi terhadap pelajar SMA. *Jurnal Komunikasi Politik*, 7(1), 44–56.

Watchdoc. (2024). *Dirty Vote* [Film dokumenter]. Disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. <https://www.youtube.com/@dirtyvote>